

# Pengembangan Agroindustri Bahan Pangan untuk Peningkatan Nilai Tambah melalui Transformasi Kelembagaan di Pedesaan

Roosganda Elizabeth<sup>1</sup>

## Ringkasan

Tepung merupakan salah satu bentuk hasil olahan primer yang dibutuhkan oleh industri berbagai jenis makanan. Tepung kasava berpeluang memiliki daya saing tinggi sebagai bahan substitusi tepung terigu. Pengembangan teknologi pengolahan tepung merupakan penunjang pengembangan agroindustri bahan pangan di pedesaan, yang memerlukan teknologi inovatif pascapanen. Berbagai aspek dan simpul kritis kelembagaan perlu diperhatikan dalam proses transformasi kelembagaan tradisional, dalam rangka mendukung pengembangan agroindustri bahan pangan di pedesaan dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Pengembangan agroindustri perlu terkait dengan keberhasilan produksi pertanian, keragaman dan tingkat permintaan pasar, disertai oleh kelengkapan regulasi dan peraturan yang berpihak pada petani produsen bahan baku. Dengan perbaikan dan pengembangan teknologi pengolahan, kualitas tepung yang komparatif dan berdaya saing tinggi dapat dicapai. Di samping perbandingan harga yang relatif lebih rendah, berbagai aspek terkait dengan kualitas tepung kasava sebagai substitusi tepung terigu perlu distandardisasi. Pengembangan kelembagaan ketenagakerjaan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM dalam pembuatan produk olahan sangat dibutuhkan dalam mendukung pengembangan agroindustri di pedesaan.

**P**engembangan jejaring sosial pertanian di pedesaan dapat diupayakan melalui transformasi dan pemberdayaan kelembagaan tradisional. Potensi utama sumber daya ekonomi lokal/pedesaan telah dimanfaatkan menurut kepentingan sepihak, sehingga terbengkalainya kelembagaan tradisional justru menghambat pembangunan pertanian pedesaan. Jika sistem kelembagaan tidak berfungsi, maka program pengembangan teknologi dan investasi tidak akan mampu menjadi “mesin penggerak” kemajuan ekonomi yang tangguh (Elizabeth 2008).

Untuk menumbuhkan ekonomi pedesaan perlu upaya untuk memperkuat jaringan sosial masyarakat dan kelembagaan, baik dari aspek struktur atau

---

<sup>1</sup> Peneliti pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

konfigurasinya (sebagai jaringan yang efisien), keanggotaan (tingkat partisipasi masyarakat) maupun peranan atau fungsi (pembagian kerja secara organik). Transformasi dan penguatan jaringan kelembagaan yang berbasis sumber daya pertanian yang menangani teknologi pengolahan tepung dengan pemberdayaan masyarakat tani adalah salah satu upaya penting dan faktor penunjang dalam pengembangan agroindustri bahan pangan (termasuk tepung) di pedesaan.

Tepung merupakan salah satu bahan dasar pembuat aneka panganan yang sangat dibutuhkan oleh berbagai industri penghasil berbagai jenis makanan, baik jenis makanan pokok, maupun camilan. Kasava adalah satu jenis tepung yang memiliki daya saing tinggi dan diupayakan sebagai substitusi tepung terigu.

Untuk mendukung pengembangan agroindustri bahan pangan di pedesaan dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, maka berbagai aspek dan simpul kritis perlu dibenahi dalam proses transformasi kelembagaan tradisional.

Agroindustri harus mampu berperan dalam peningkatan nilai tambah (*utility*), penyerapan dan produktivitas kelembagaan tenaga kerja, dan memperluas jangkauan kelembagaan pemasaran melalui kajian deskriptif. Terdapat empat elemen kunci dalam pengembangan agroindustri pedesaan, yaitu: 1) aglomerasi perusahaan (*cluster*); 2) peningkatan nilai tambah (*value added*) dan mata rantai nilai (*value chain*); 3) jaringan pemasok dan pelanggan; dan 4) jaringan infrastruktur ekonomi fisik dan nonfisik (Supriyati *et al.* 2006). Transformasi kelembagaan tradisional yang berkaitan dengan pengembangan agroindustri di pedesaan adalah dalam hal tenaga kerja (SDM) dan pemasaran, terutama dalam penerapan teknologi inovatif pascapanen, mutlak diperlukan untuk terwujudnya agroindustri berbasis produk pertanian.

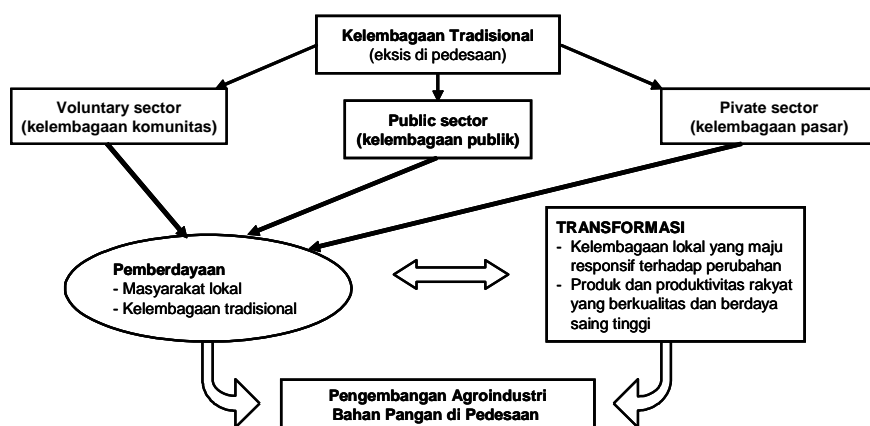
## Peran Transformasi Kelembagaan Tradisional

Dari perspektif sosiologi pembangunan, kelembagaan diibaratkan sebagai organ-organ dalam tubuh manusia yang mengaktifkan masyarakat tersebut. Setiap fungsi dalam masyarakat pasti dijalankan oleh sebuah (atau lebih) kelembagaan. Perubahan lingkungan eksternal menuntut perubahan operasional kelembagaan, termasuk di tingkat lokal. Kelembagaan lokal-tradisional adalah kelembagaan yang hidup dan diterima oleh komunitas (*voluntary sector*), kelembagaan pasar (*private sector*) yang dijiwai oleh paham ekonomi terbuka, dan kelembagaan sistem politik atau pengambilan keputusan di tingkat publik (*public sector*). Oleh karena itu, kelembagaan tradisional di pedesaan perlu mereformasi diri dan bersinergis agar sesuai dengan kebutuhan yang selalu mengalami perkembangan. Inilah yang

dimaksud dengan transformasi kelembagaan, yang dilakukan tidak hanya secara internal namun juga eksternal dari keseluruhan kelembagaan.

Sistem kelembagaan suatu masyarakat yang rapuh akan melemahkan keberhasilan pelaksanaan program pengembangan teknologi, inovasi, investasi dan tidak tercapainya kemajuan ekonomi yang tangguh. Awal tahun 1970an, Hayami dan Ruttan menggulirkan *Induced Innovation Model*, yang menjelaskan keterkaitan antara 4 faktor, yaitu subsidi/peran: 1) sumberdaya; 2) kultural; 3) teknologi; dan 4) kelembagaan (institusi) (Ruttan 1988; dalam: Taryoto 1995). Upaya mentransformasikan pertanian tradisional ke arah pertanian modern selain melalui perubahan struktur ekonomi pertanian, juga menyangkut perubahan struktur dan pola perilaku sosial masyarakat pedesaan. Salah satunya melalui pemberdayaan kelembagaan tradisional, sehingga tidak melebarkan kesenjangan dalam pengembangan agroindustri bahan pangan di pedesaan dan pembangunan pertanian.

Gambar 1 merupakan visualisasi dari tiga pilar yang menopang kelembagaan tradisional di pedesaan, yaitu: 1) kelembagaan yang hidup dan telah diterima oleh komunitas lokal/tradisional (*voluntary sector*); 2) kelembagaan pasar (*private sector*) sejalan dengan keterbukaan ekonomi, dan 3) kelembagaan sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di tingkat publik (*public sector*). Esmann dan Uphoff (1984) dan Uphoff (1992) mengklasifikasikan kelembagaan tradisional dalam beberapa kategori, yaitu: administrasi lokal, pemerintah lokal, organisasi/kelembagaan yang beranggotakan masyarakat lokal, kerja sama usaha, pelayanan dan bisnis swasta (agroindustri) yang dapat diintegrasikan ke dalam pasar lokal, regional, dan global.



Gambar 1. Berbagai aspek kelembagaan tradisional terkait pengembangan agroindustri di pedesaan.

## Simpul Kritis Transformasi Kelembagaan Tradisional

Pembangunan pedesaan menghendaki transformasi kelembagaan pertanian tradisional yang menyangkut perubahan berbagai aspek yang membentuk perilaku. Lemahnya kapasitas dan kinerja kelembagaan pedesaan yang dibentuk oleh nilai-nilai tradisional, diprediksi sebagai salah satu kondisi yang dapat menyebabkan rendahnya kinerja perekonomian di pedesaan.

Simpulan kritis untuk transformasi kelembagaan tradisional di pedesaan (Saptana *et al. dalam* Elizabeth 2008), di antaranya adalah:

1. Tujuan pembentukan kelembagaan oleh pemerintah masih terfokus pada upaya peningkatan produksi pertanian dalam jangka pendek dengan tekanan kegiatan di lapang cenderung hanya pada penerapan teknologi produksi.
2. Pembentukan kelembagaan lebih ditekankan untuk memperkuat ikatan horizontal daripada ikatan vertikal, di mana pengenalan inovasi teknologi lebih menekankan pada pendekatan material dibanding nonmaterial atau kelembagaan. Masalah kelembagaan yang semakin lemah dipandang bukan sebagai penghambat.
3. Kelembagaan dibentuk antara lain bertujuan untuk distribusi bantuan, bukan hanya ditekankan pada peningkatan kualitas SDM masyarakat pedesaan, agar dapat mengaplikasi dan mengembangkan teknologi inovatif agroindustri berbasis produk pertanian .
4. Pembinaan kelembagaan cenderung bersifat individual (*trickle down effect*), misalnya dengan pembinaan kontak-kontak tani dalam kegiatan penyuluhan pertanian.
5. Pengembangan kelembagaan cenderung menggunakan pendekatan struktural daripada kultural. Dengan struktur demikian diharapkan perilaku dan tindakan masyarakat akan mengikutinya.
6. Aspek teknologi dijadikan sebagai fokus utama dalam perancangan kebijakan pemerintah untuk memecahkan masalah ekonomi masyarakat pedesaan.

Hubungan interdependensi atau kemitraan kelembagaan yang terbentuk mencirikan interaksi yang asimetris, sehingga tidak menguntungkan bagi perbaikan kualitas ketenagakerjaan (SDM) petani. Kondisi tersebut mencerminkan pendekatan kebijakan perancang pembangunan yang bersifat sentralistik (*top down*), *centrally planned economies* (Kozminski 1990 *dalam* Elizabeth 2008) dan monolitik, sehingga terkesan sulit berkembang dan tidak mengakar pada adat, kebudayaan, dan *local knowledge* masyarakat setempat. Untuk memperbaiki kondisi tersebut diperlukan transformasi dan pemberdayaan kelembagaan tradisional. Hal tersebut dimulai dari masyarakatnya agar menjadi esensial untuk mencapai kesinergisan optimum dalam aktivitasnya di tingkat lokal, dapat membantu transformasi ke arah

industrialisasi, dan memudahkan petani mengembangkan sistem kelembagaan agroindustri pangan berbasis produk pertanian.

## **Pentahapan Transformasi Kelembagaan Tradisional di Pedesaan**

Dengan memperhatikan simpul kritis transformasi kelembagaan, terdapat tiga tahap transformasi kelembagaan tradisional di pedesaan, yaitu:

### **1. Tahap masyarakat komunal**

Tipe masyarakat komunal merupakan ciri yang universal ketika ketergantungan antarpenduduk masih tinggi dan campur tangan pihak luar masih rendah (campur tangan pemerintah belum intensif). Salah satu cirinya adalah kepemilikan dan distribusi manfaatnya secara bersama, di mana pengambilan keputusan yang penting masih menjunjung tinggi prinsip kebersamaan (solidaritas) dan penetapan keputusan yang demokratis. Masyarakat lokal memutuskan sendiri pembentukan lembaga yang dibutuhkan, yang mencakup struktur, mekanisme pemilihan anggota, pola kepemimpinan, penetapan keputusan yang demokratis, *rule of the game* (aturan main) dan sanksinya. Bahkan sejak 1970an eksistensi kelembagaan tetap hidup, meski dengan sedikit kelembagaan namun kaya dalam fungsi dan cakupannya.

### **2. Tahap transformasi masyarakat komunal**

Invasi kekuatan atas desa terhadap masyarakat desa mulai terasa sejak 'era pembangunan' oleh pemerintah orde baru. Berbagai kelembagaan baru (koperasi/ BUUD/ KUD, LKMD, LMD, dan sebagainya) diintroduksi dengan struktur dan norma yang telah ditentukan, walau kepada masyarakat lokal belum dilakukan pengenalan dan pemahaman yang memadai tentang kelembagaan tersebut.

Penetrasi kelembagaan baru, seiring dengan makin intensifnya pengembangan pembangunan pedesaan secara fisik, bukannya memperkuat jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, tapi seringkali justru menggantikan bahkan menghancurkan kelembagaan tradisional (terjadi gejala banyak kelembagaan, namun miskin fungsi). Kelembagaan baru lebih berperan sebagai alat untuk mobilisasi sosial dan memudahkan kontrol dari atas, sehingga yang sering terjadi adalah deformasi kelembagaan tradisional, bukan transformasi yang bersifat alamiah.

### **3. Tahap komunalitas baru (model transformasi kelembagaan)**

Pemerintah mulai merasakan timbulnya kekeliruan dalam penetrasi kelembagaan yang tidak dibarengi dengan pendekatan kultural (aspek

kelembagaan), sehingga pemerintah mulai beralih dengan pendekatan baru yang lebih menghargai komunitas lokal. Peran kepemimpinan lokal kembali direvitalisasi untuk lebih menjamin keberhasilan pembentukan kelembagaan intoduksi. Kelembagaan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) sebagai salah satu model kelembagaan transformasi/introduksi (mulai digerakkan pada tahun 1990-an) menunjukkan perkembangan yang baik, walau belum spektakuler. Hal ini tercermin dari perannya dalam mendukung perkembangan agribisnis (padi, palawija, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan) di pedesaan.

Kelembagaan koperasi dan lainnya mulai berusaha mandiri secara sesungguhnya, dengan tidak mengisolasi diri untuk berbagai kepentingan lain, yang secara sosiologis saling berkaitan dengan aspek sosial-ekonomi masyarakat pedesaan (agama, budaya, adat-istiadat, dan sosial). Bahkan sejak era otonomi daerah, kebijakan pengelolaan kelembagaan oleh pemerintah berangsur-angsur beralih kepada masyarakat lokal yang secara rutin diberi bantuan, salah satunya berupa program BLM (walau belum mencukupi) untuk pembangunan sarana sosial umum yang mendukung program pembangunan pedesaan.

Oleh karena itu, dengan memahami deskripsi transformasi dan simpul kritis kelembagaan tradisional (terutama lembaga tenaga kerja, pasar, dan permodalan), diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran dalam mengkaji pengembangan agroindustri di pedesaan. Hal tersebut diperlukan dalam mengurai berbagai kendala dan sasaran yang hendak dicapai demi terwujudnya peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja serta terciptanya struktur perekonomian yang seimbang di pedesaan.

## **Agroindustri Berbasis Produk Pertanian Terkait Transformasi Kelembagaan Tradisional di Pedesaan**

Kebijakan pembangunan dan pengembangan agroindustri terutama diperlukan untuk mendorong terciptanya keseimbangan struktur perekonomian. Beberapa kendala dalam pengembangan agroindustri adalah: 1) belum berkembangnya teknologi pengolahan karena masih kecil dan terbatasnya sumber permodalan; 2) rendahnya kualitas tenaga kerja (SDM) dan belum profesional; 3) sarana dan prasarana belum memadai; 4) rendahnya jaminan mutu dan kontinuitas (ketersediaan) bahan baku; 5) pemasaran belum berkembang karena produk agroindustri belum memenuhi persyaratan pasar, khususnya pasar internasional; dan 6) belum adanya kebijakan riil yang mendorong berkembangnya agroindustri di dalam negeri.

Untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, selain sebagai penarik pembangunan sektor pertanian, maka beberapa sasaran pengembangan agroindustri adalah terciptanya nilai tambah dan lapangan

kerja, peningkatan pembagian dan penyebaran pendapatan, dan peningkatan penerimaan devisa. Dalam tulisan ini agroindustri dimaksudkan berperan dalam penciptaan nilai tambah (*utility*), penyerapan dan produktivitas kelembagaan seperti tenaga kerja dan pasar. Melalui kajian deskriptif dikemukakan peran peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia (tenaga kerja) serta perbaikan kelembagaan pasar sehingga mampu meraih dan memperluas jangkauan pemasaran.

Kebijakan pengembangan agroindustri antara lain adalah industri yang berbahan baku ubi kayu. Program ITTARA (Industri Tepung Tapioka Rakyat) yang dikembangkan di Lampung (Supriyati *et al.* 2006) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani yang meliputi pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja (SDM) petani, memperkuat *bargaining position*, peningkatan *utility* (nilai tambah) ubi kayu (bahan baku tepung kasava/tapioka) di tingkat petani, dan peningkatan kegiatan perekonomian melalui pengembangan agroindustri di pedesaan agar dapat mendorong tenaga kerja yang migran (dampak krisis ekonomi tahun 1997) untuk kembali ke desa.

Data statistik BKPM dan Dinas Perindag Provinsi Lampung 2003 menunjukkan perusahaan agroindustri ubi kayu mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 142.186 orang, ITTARA menyerap tenaga kerja 95.938 orang, sedang industri non-ITTARA menyerap 3.957 orang. Dengan total penyerapan tenaga kerja 234.869 orang, maka sektor agroindustri ubi kayu mampu memberi lebih 60% lapangan kerja dari total pekerja sektor industri. Nilai tambah yang diberikan dari harga produk primer (ubi kayu) menjadi harga produk akhir (tepung kasava) bisa mencapai 3-4 kali lipat. Analisis nilai tambah agroindustri tepung kasava dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 diketahui nilai input, output, dan nilai tambah pada beberapa perlakuan terhadap bahan baku dan jenis perusahaan. Secara umum, nilai output perusahaan skala besar/sedang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan lainnya. Khusus untuk sagu kristal, perusahaan yang bahan baku ubi kayu kupas (Kasus 1) memiliki nilai produk yang lebih tinggi.

Rendemen sagu yang dihasilkan juga bervariasi dan tertinggi dihasilkan oleh perusahaan skala besar/sedang, karena dengan teknologi yang lebih baik akan dihasilkan sagu yang lebih banyak dibanding produk lainnya (onggok dan ellot). Dengan membandingkan nilai output dan input, pengolahan ubi kayu menjadi tepung kasava memberikan nilai tambah finansial rata-rata 30% dari nilai output.

Pengolahan dan pembuatan tepung tapioka (kasava) yang termasuk salah satu upaya pembangunan dan pengembangan agroindustri belum memperoleh peluang pasar karena kurangnya informasi dan sosialisasi kegunaan dan nilai tambah ekonominya, sehingga belum mampu merangsang petani untuk mengusahakan dan memanfaatkan teknologi pengolahannya. Teknologi merupakan salah satu penunjang keberhasilan pengembangan agroindustri,

Tabel 1. Perbandingan harga input, output, nilai tambah beberapa agroindustri di Lampung.

Uraian	Nilai ekonomi (Rp/kg)				
	Kasus 1	Kasus 2	Kasus 3	Kasus 4	Rata-rata
<b>Bahan baku</b>					
• Singkong basah	330	330	340	315	328,75
• Singkong kupas	360	-	-	-	360
Biaya TK + Modal	555	535	585	595	575
<b>Nilai output</b>					
• Sagu kristal	2.350	1.900	1.850	2.150	2.063
• Sagu kristal ikutan I	1.450	1.650	1.650	1.850	1.650
• Sagu kristal ikutan II	1.000	1.450	1.250	1.650	1.338
• Onggok kering	550	450	500	450	488
• Produk lainnya	45	35	25	35	35
<b>Nilai tambah</b>					
• Seluruh output	928,47	733,71	750,25	852,56	810,81
• Sagu kristal	771,46	545,02	573,33	624,77	624,77
• Sagu kristal ikutan I	17,72	50,46	39,10	64,16	64,16
• Sagu kristal ikutan II	13,36	40,31	38,63	67,13	67,13
• Onggok kering	98,21	81,32	87,69	80,57	80,57
• Produk lainnya	20,92	16,59	11,50	15,92	15,92
Rendemen sagu (%)	24,67	24,22	22,88	25,38	24,83
<b>Nilai tambah thdp nilai output</b>					
• Sagu kristal	33,13	28,69	30,99	29,06	30,29
• Sagu kristal ikutan I	1,22	3,06	2,37	3,47	3,89
• Sagu kristal ikutan II	1,32	2,78	3,09	4,07	5,02
• Onggok kering	17,86	18,07	17,54	17,90	16,53
• Produk lainnya	46,49	47,40	46,00	45,49	45,49

Kasus 1: ITTARA berbahan baku ubikayu kupas kulit

Kasus 2: ITTARA berbahan baku ubikayu tanpa kupas kulit

Kasus 3: IKM non-ITTARA

Kasus 4: Perusahaan skala besar/sedang

Sumber: Supriyati *et al.* 2006.

sehingga harus bersifat tepat guna, efisien, dan mudah diaplikasikan. Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak disertai oleh peningkatan areal tanam dan panen untuk pemenuhan kebutuhan pangan pokok beras, maka substitusi dan diversifikasi pangan nonberas seperti umbi-umbian dan jagung menjadi penting.

Pengolahan bahan pangan dari tepung menjadi aneka produk pangan olahan selama ini masih mengandalkan tepung terigu sebagai bahan dasar, yang dewasa ini harganya cukup tinggi yang umumnya diimpor. Hasil pengkajian Budijono *et al.* (2005) menunjukkan bahwa tepung kasava mampu mensubstitusi terigu untuk berbagai produk pangan, yang mengindikasikan dapat mengurangi impor terigu. Cara pengolahan ubikayu menjadi tepung kasava dan produk olahannya telah dikemukakan oleh Balitkabi (Budijono *et*



al. 2005). Tepung kasava merupakan *intermediate product* (bahan setengah jadi) yang dapat memperpanjang daya simpan, menghemat ruang simpan, meningkatkan nilai guna, mudah diformulasi dan diolah menjadi tepung komposit.

Berbagai kajian terhadap tepung kasava, baik dari aspek teknologi pengolahan (membentuk tepung hingga produk olahan) maupun kandungan gizi dan peluang pasar telah banyak dilakukan. BPTP Yogyakarta (2000) juga telah mengkaji pengembangan diversifikasi pangan nonberas menjadi bahan pangan pokok atau bahan substitusi. Pengkajian meliputi 1) perbaikan kualitas tepung; 2) inovasi produk olahan tepung kasava; 3) preferensi konsumen; 4) peluang pasar, termasuk pembenahan penampilan produk dan cara pengemasan (Budijono *et al.* 2005). Seluruh aspek pengkajian tentu terkait erat dengan peningkatan kualitas kelembagaan SDM pelaku produksi agroindustri tersebut.

Sesungguhnya, nilai tambah yang diperoleh dari pengembangan agroindustri di pedesaan tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM dalam implementasi teknologi pengolahan tepung kasava, terbukanya peluang usaha pengolahan produk olahan berbahan baku tepung kasava, meningkatnya akses terhadap informasi di luar desa, meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Sebagai penghela pembangunan pertanian, agroindustri diharapkan mampu menciptakan pasar berbagai produk pertanian dan olahannya, mampu memotori industrialisasi pedesaan, serta mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Penerapan teknologi agroindustri aneka tepung di pedesaan sangat perlu dikembangkan karena memiliki peluang besar, baik di sisi peningkatan SDM masyarakat maupun ketenagakerjaan dan perekonomian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga di pedesaan. Secara komersial produksi bahan pangan berupa tepung prospektif dikembangkan dalam sistem agroindustri (Damardjati 1993 *dalam* Budijono *et al.* 2005). Dalam hal ini diperlukan pemantauan, pengembangan, dan peningkatan peluang pasar, pembinaan dan pengembangan teknologi kelembagaan SDM, serta partisipasi dan pengembangan kelembagaan finansial (sebagai pendukung modal usaha) oleh berbagai pihak terkait.

## Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

- Pengembangan teknologi penanganan dan pengolahan tepung merupakan salah satu faktor penunjang pengembangan dan peningkatan sistem agroindustri bahan pangan di pedesaan, yang terkait dengan pengembangan kelembagaan SDM pelaku dan kelembagaan terkait lainnya.

- Kapasitas dan kinerja kelembagaan pedesaan yang dibentuk nilai-nilai tradisional yang relatif rendah, diprediksi sebagai salah satu kondisi yang dapat menyebabkan rendahnya kinerja perekonomian di pedesaan. Tercapainya hasil pembangunan pedesaan sesuai perencanaan menghendaki transformasi kelembagaan pertanian tradisional.
- Penerapan inovasi teknologi agroindustri di pedesaan diupayakan memiliki kredibilitas, bisa memberi inspirasi semangat kerja untuk maju, serta kondisi masing-masing daerah (spesifik lokasi) perlu dipertimbangkan dan dijadikan dasar untuk perancangan pengembangan agroindustri bahan pangan di pedesaan.
- Kebijakan pemerintah umumnya bias investasi fisik dan permodalan akan lebih bermanfaat bila diselaraskan dengan pengembangan kelembagaan pedesaan yang identik dengan perkembangan pertanian, sehingga diharapkan mampu mengakomodasikan pengembangan agroindustri berbasis produk pertanian.
- Program pengembangan teknologi dan investasi di pedesaan akan mampu menjadi mesin penggerak kemajuan ekonomi yang tangguh, jika sistem kelembagaannya berfungsi sejalan dengan program pembangunan yang dilaksanakan.
- Selain dari sisi finansial, nilai tambah yang diperoleh dari pengembangan agroindustri di pedesaan juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM dalam implementasi teknologi pengolahan tepung kasava, terbukanya peluang usaha pengolahan produk olahan berbahan baku tepung kasava, meningkatnya akses terhadap informasi di luar desa, dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
- Sebagai penghela pembangunan pertanian, agroindustri diharapkan mampu menciptakan pasar berbagai produk pertanian dan produk olahannya, mampu memotori industrialisasi pedesaan, serta mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.
- Pengembangan agroindustri bahan pangan di pedesaan perlu disertai oleh program yang langsung menuju sasaran (rumah tangga petani sebagai subjek), dimana *agroindustrial development* dikombinasikan dengan *rural development* sehingga menjadi satu program pembangunan pedesaan yang komprehensif, yaitu *rural-agroindustrial development*.
- Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan, perhatian hendaknya difokuskan pada perbaikan dan pembenahan ragam kelembagaan yang berdayaguna dan berhasilguna serta ke arah peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan.

## Pustaka

- Budijono, A., Yuniarti, Suhardi, Suharjo, dan W. Istuti. 2005. Kajian pengembangan agroindustri aneka tepung di pedesaan. Prosiding Semnas. Inovasi dan Kelembagaan Agribisnis Tahun 2004. p. 247-254. PSE. Bogor.
- Elizabeth, R. 2008. Diagnosa kemarjinalan kelembagaan lokal untuk menunjang perekonomian rakyat di pedesaan. *Journal on Socio-Economics of Agricultural and Agribusiness* 8(2):58-64.
- Hayami, Y. dan M. Kikuchi. 1987. Dilema ekonomi desa: suatu pendekatan ekonomi terhadap perubahan kelembagaan di Asia. Yayasan Obor. Indonesia. Jakarta.
- Saptana dan R. Elizabeth. 2003. Transformasi kelembagaan tradisional. Laporan hasil penelitian. PSE. Bogor.
- Saptana dan R. Elizabeth. 2004. Transformasi kelembagaan guna memperkuat ekonomi rakyat di pedesaan. *Journal on Socio-Economics of Agricultural and Agribusiness*. (Jurnal SOCA).
- Supriyati, E. Suryani, H. Tarigan, dan A. Setyanto. 2006. Analisis peningkatan nilai tambah melalui pengembangan agroindustri di pedesaan. LHP. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan K Pertanian. Bogor.
- Uphoff, N. 1992. *Local institution and participation for sustainable development*. IIED. London.